

ABSTRAK

MUHAMMAD SHAUFI, NPM 20.22.199: "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PENERTIBAN JALAN DI RUAS JALAN BRIGJEND H. HASAN BASRI)." Di bawah bimbingan Bapak Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos., M.AP. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Haris Fadillah, S.Sos., M.AB., CLMA. selaku Dosen Pembimbing II.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menjadi dasar hukum dalam mewujudkan ketertiban masyarakat, termasuk penertiban jalan di ruas Jalan Brigjend H. Hasan Basri. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi permasalahan, seperti masih maraknya pelanggaran pemanfaatan ruang jalan, Belum tersedianya fasilitas tempat parkir yang memadai, serta Tingginya ketergantungan ekonomi pedagang dan pembeli terhadap kemudahan akses di pinggir jalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 9 Informan penelitian ini terdiri dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, pedagang, pengendara dan masyarakat pengguna jalan. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Hayat (2018) yang meliputi enam variabel yaitu, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana komunikasi antar organisasi, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi pelaksana. Keabsahan data di pertahankan melalui uji kredibilitas data dengan menggunakan teknik perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah telah berjalan cukup baik Hal ini ditunjukkan oleh tersedianya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas , koordinasi antarinstansi yang berjalan dengan baik, serta kualitas sumber daya manusia yang memadai. Faktor pendukung implementasi meliputi sumber daya manusia yang memadai, koordinasi antarinstansi yang berjalan dengan baik, dan memiliki SOP yang jelas. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, sosialisasi yang belum merata, belum tersedianya kantong parkir yang memadai, serta kondisi ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada bahu jalan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disarankan agar pemerintah daerah bersama Satpol PP dan Damkar meningkatkan sosialisasi, pengawasan, koordinasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dan mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Penertiban Jalan.

ABSTRACT

MUHAMMAD SHAUFI, Student ID 20.22.199:
"IMPLEMENTATION OF HULU SUNGAI UTARA REGENCY LOCAL REGULATION NO. 9 OF 2018 ON PUBLIC ORDER AND COMMUNITY PEACE (A CASE STUDY ON ROAD ENFORCEMENT ON THE BRIGJEND H. HASAN BASRI ROAD SECTION)." Under the supervision of Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos., M.AP., as First Advisor and Haris Fadillah, S.Sos., M.AB., CLMA., as Second Advisor.

Hulu Sungai Utara Regency Regional Regulation No. 9 of 2018 on Public Order and Community Peace serves as the legal basis for maintaining public order, including traffic enforcement on the Brigjend H. Hasan Basri Road section. However, its implementation still faces challenges, such as the prevalence of violations regarding the use of road space, the lack of adequate parking facilities, and the high economic dependence of vendors and shoppers on easy access along the roadside. This study aims to analyze the implementation of this Regional Regulation and the factors influencing its enforcement.

This study employed a qualitative approach using descriptive methods. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The 9 informants in this study consisted of members of the Civil Service Police Unit and Fire Department of Hulu Sungai Utara Regency, vendors, drivers, and road users. Data analysis in this study was based on the policy implementation theory proposed by Van Meter and Van Horn as cited in Hayat (2018), which encompasses six variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agents, inter-organizational communication, economic, social, and political conditions, and the dispositions of implementers. Data validity was ensured through data credibility testing using techniques such as extended observation, increased diligence, and triangulation.

The research findings indicate that the implementation of the Regional Regulation has proceeded fairly well. This is evidenced by the availability of clear standard operating procedures (SOPs), effective interagency coordination, and adequate human resources. Factors supporting implementation include adequate human resources, effective interagency coordination, and clear SOPs. Meanwhile, inhibiting factors include limited facilities and infrastructure, uneven public awareness campaigns, the lack of adequate parking spaces, and the economic conditions of the community, which still rely on roadside activities.

Based on the results of the above study, it is recommended that local governments, together with the civil service police and fire departments of Hulu Sungai Utara Regency, enhance public awareness campaigns, supervision, coordination, and the provision of supporting facilities and infrastructure to improve public compliance and optimize the implementation of local regulations.

Keywords: Policy Implementation, Local Regulations, Public Order, Road Enforcement